Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Otoritas Multiple dan Segregasi Spasial: Perkembangan Institusi Muslim di Kuartal Arab Port Said, Mesir 1882–1904

Mariyah Ulfa
UIN Sunan Ampel Surabaya
03010223008@uinsa.ac.id

Muzaiyana
UIN Sunan Ampel Surabaya
muzaiyana@uinsa.ac.id

Abstrak: Port Said merupakan kota pelabuhan yang dibangun sejak tahun 1859 seiring pembangunan Terusan Suez dan dibuka resmi pada 1869. Pertumbuhan kota ini diikuti oleh terbentuknya Kuartal Arab sebagai kawasan permukiman terpisah bagi penduduk Muslim-Arab, di samping Kuartal Eropa (Afrang) yang dihuni komunitas kosmopolitan asing. Kajian mengenai Port Said selama ini didominasi oleh perspektif sejarah migrasi buruh dan mobilitas kosmopolitan, sementara perkembangan institusi keagamaan Muslim di Kuartal Arab di bawah tata kelola otoritas multiple yang melibatkan militer Inggris, Suez Canal Company, dan Pemerintah Khedive belum banyak dikaji secara khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola otoritas multiple di Port Said setelah pendudukan Inggris pada 1882, mengkaji pembagian ruang perkotaan dan pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab, serta menjelaskan perkembangan institusi keagamaan Muslim pada 1882–1904 dalam konteks tata kelola kota dan segregasi spasial. Penelitian menggunakan pendekatan historis dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, bersumber dari kliping surat kabar sezaman, data sensus resmi Mesir tahun 1897 sebagai acuan demografi terdekat, dokumentasi buruh pelabuhan Port Said, serta sumber visual berupa foto arsip dan kartu pos yang merekam eksistensi Kuartal Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola otoritas multiple dan segregasi spasial memengaruhi pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab dan mendorong perkembangan institusi keagamaan Muslim sepanjang 1882–1904.

Kata Kunci: *Port Said, Kuartal Arab, Muslim, Otoritas Multiple, Segregasi Spasial.*

PENDAHULUAN

Port Said merupakan kota pelabuhan di timur laut Mesir yang berkembang seiring pembangunan Terusan Suez sejak 1859 dan pembukaan kanal pada November 1869 (Baedeker, 1885). Dalam perkembangannya kota ini memiliki dua kawasan permukiman yang dikenal sebagai Kuartal Eropa (*European Town*) dan Kuartal Arab (*Arab Town*). Keberadaan kedua kawasan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan Port Said tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pelabuhan tetapi juga dengan pembentukan ruang permukiman yang berbeda. Kuartal Arab menjadi kawasan penting untuk menelusuri kehidupan penduduk lokal termasuk pertumbuhan komunitas Muslim dan perkembangan institusi keagamaannya.

Pendudukan Inggris di Mesir pada 1882 berlangsung dalam konteks tata kelola Port Said yang melibatkan sejumlah pihak termasuk Pemerintah Mesir, militer Inggris, dan Suez Canal Company (SCC). Ketiganya memiliki kedudukan dan kepentingan kelembagaan yang berbeda. Hoskins (1882) mencatat keberadaan pasukan Inggris di antara kawasan Eropa dan Arab sementara pemerintahan sipil Mesir tetap dijalankan oleh gubernur setempat. Informasi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam kehidupan kota meskipun bentuk dan batas kewenangan masing-masing perlu ditelusuri melalui sumber sejarah. Oleh karena itu perkembangan komunitas Muslim di Kuartal Arab perlu dikaji dengan memperhatikan tata kelola kota serta pembagian ruang permukiman yang telah terbentuk.

Penelitian terdahulu mengenai Port Said telah membahas perkembangan kota dari perspektif tata ruang, migrasi, dan kehidupan masyarakat. Carminati (2021) mengkaji pembentukan batas-batas sosial dan pembagian ruang perkotaan di Port Said pada akhir abad ke-19. Carminati (2023) menelusuri peran migrasi tenaga kerja dalam pembentukan kota, termasuk perubahan tata kelola dan kehidupan penduduk. Sementara itu El Amrousi (2001) memasukkan Port Said dalam kajiannya mengenai ruang Muslim di sejumlah kota. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami perkembangan ruang perkotaan dan kehidupan masyarakat di Port Said. Artikel ini mengambil fokus yang lebih khusus dengan mengkaji keterkaitan tata kelola beberapa otoritas, pembagian ruang perkotaan, pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab, dan perkembangan institusi keagamaannya pada 1882–1904.

Dalam penelitian ini istilah *otoritas multiple* digunakan untuk menjelaskan keterlibatan beberapa pihak yang memiliki kedudukan, kepentingan, dan kewenangan

kelembagaan berbeda dalam tata kelola Port Said. Adapun segregasi spasial merujuk pada pemisahan atau pengelompokan penduduk dalam ruang perkotaan. Segregasi tersebut dapat berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, asal-usul penduduk, dan pengaturan ruang, sehingga keberadaan pemisahan kawasan tidak dengan sendirinya membuktikan diskriminasi berdasarkan agama (Massey & Denton, 1988). Kedua konsep ini digunakan untuk menelaah tata kelola kota dan pembagian kawasan permukiman sebagai konteks bagi perkembangan komunitas serta institusi keagamaan Muslim. Mengingat pembagian antara Kuartal Eropa dan Kuartal Arab telah terbentuk sebelum pendudukan Inggris pada 1882, penelitian ini tidak menempatkan pendudukan Inggris sebagai penyebab awal pemisahan kawasan, tetapi mengkaji perkembangan tata kelola kota dalam struktur ruang yang telah ada.

Penelitian ini dibatasi pada periode 1882–1904 dengan fokus pada Kuartal Arab Port Said. Tahun 1882 dipilih karena pendudukan Inggris menandai perubahan dalam situasi politik dan keamanan Mesir. Sementara itu, tahun 1904 ditetapkan sebagai batas akhir pengamatan terhadap perkembangan komunitas dan institusi keagamaan Muslim pada periode yang diteliti. Pembatasan ini tidak berarti bahwa seluruh institusi yang dibahas telah selesai dibangun atau mulai beroperasi pada tahun tersebut. Institusi keagamaan dalam penelitian ini terutama mencakup masjid dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat ibadah, sejauh keberadaannya dapat ditelusuri melalui sumber sejarah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola otoritas multiple di Port Said, mengkaji pembagian ruang perkotaan dan pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab, serta menjelaskan perkembangan institusi keagamaan Muslim dalam konteks tata kelola kota dan segregasi spasial.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurrahman, 2011). Pada tahap heuristik sumber dikumpulkan dari surat kabar sezaman, data sensus Mesir, laporan administratif, dokumen mengenai perkembangan kota dan pelabuhan, serta foto dan kartu pos dari koleksi arsip dan perpustakaan digital. Kritik sumber dilakukan untuk menilai asal-usul, konteks, keandalan, dan isi informasi yang digunakan. Data kependudukan, misalnya, diperiksa berdasarkan cakupan wilayah dan kategori penduduk yang dicatat agar jumlah penduduk seluruh kota tidak disamakan dengan jumlah komunitas Muslim di Kuartal Arab. Pada tahap interpretasi, informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan dihubungkan untuk memahami tata kelola kota, pembagian ruang, pertumbuhan

komunitas Muslim, serta perkembangan institusi keagamaannya. Hasil analisis kemudian disusun secara kronologis dan analitis pada tahap historiografi.

Pembahasan artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, karakteristik tata kelola otoritas multiple di Port Said, dengan perhatian pada kedudukan dan kewenangan Pemerintah Mesir, militer Inggris, dan SCC. *Kedua*, pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab berdasarkan bukti kependudukan dan sumber sezaman mengenai kehidupan masyarakat. *Ketiga*, perkembangan institusi keagamaan Muslim pada 1882–1904, terutama pembangunan masjid dan upaya memenuhi kebutuhan tempat ibadah. Ketiga bagian tersebut menjadi dasar untuk menganalisis tata kelola otoritas multiple dan segregasi spasial sebagai konteks perkembangan komunitas Muslim serta institusi keagamaannya di Kuartal Arab Port Said.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tata Kelola Otoritas Multiple di Port Said

Sejak pembangunannya pada 1859 Port Said berkembang sebagai kota pelabuhan yang melibatkan kepentingan Pemerintah Mesir dan Suez Canal Company (SCC). Perusahaan tersebut tidak hanya mengoperasikan Terusan Suez tetapi juga terlibat dalam penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas pelabuhan dan kehidupan perkotaan. Kondisi tersebut menjadikan perkembangan Port Said berlangsung melalui hubungan antara administrasi pemerintah dan kepentingan perusahaan kanal (Reclus, 1884). Keterlibatan SCC dalam pengelolaan kota terlihat pada perubahan kewenangan atas pelayanan jalan atau *voirie*. Carminati (2026) menjelaskan bahwa kewenangan tersebut sempat berada di tangan perusahaan dan beralih kepada Pemerintah Mesir pada 1872 kemudian kembali berada dalam pengaturan *domaine commun* pada 1877. Dalam pengaturan tersebut SCC tetap memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pelayanan jalan meskipun Pemerintah Mesir menanggung sebagian biaya. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pembiayaan pelayanan publik dan pengendalian pelaksanaannya tidak selalu berada pada pihak yang sama (Carminati, 2026).

Pendudukan Inggris atas Mesir pada 1882 menambah satu pihak dalam tata kelola Port Said. Intervensi militer Inggris berlangsung dalam konteks Pemberontakan Urabi dan kepentingan strategis Inggris terhadap Terusan Suez (Thames Advertiser, 1882). Laporan Rear-Admiral A. H. Hoskins mengenai operasi militer pada Agustus 1882 memperlihatkan bagaimana kewenangan tersebut dijalankan di tingkat kota. Setelah

pendudukan, gubernur yang ditunjuk Khedive dikembalikan ke jabatannya untuk menjalankan pemerintahan sipil, sedangkan komandan militer Inggris bertanggung jawab atas garnisun. Pemeliharaan ketertiban dilakukan melalui patroli tentara Inggris bersama polisi Mesir, sementara pengamanan lokasi strategis, termasuk waduk dan kawasan konsulat, menjadi bagian dari pengaturan militer (Hoskins, 1882).

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pendudukan Inggris tidak serta-merta menghapus administrasi sipil Mesir. Pemerintahan sipil tetap berjalan tetapi berdampingan dengan kewenangan militer Inggris. Pembagian fungsi tersebut tidak setara antara Pemerintah Mesir menjalankan urusan sipil, sedangkan Inggris mengambil peran penting dalam keamanan dan pertahanan. Pada saat yang sama SCC tetap memiliki kepentingan terhadap pengoperasian kanal dan fasilitas pelabuhan (Hoskins, 1882).

Hubungan antara Pemerintah Mesir dan SCC juga terlihat dalam penyediaan air. Katalog *Archives nationales du monde du travail* mencatat adanya perjanjian tertanggal 13 Desember 1884 antara Pemerintah Mesir dan perusahaan mengenai penyediaan air tawar bagi Port Said (Compagnie universelle du canal maritime de Suez et al., 1884). Keberadaan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan air melibatkan kesepakatan formal antara kedua pihak.

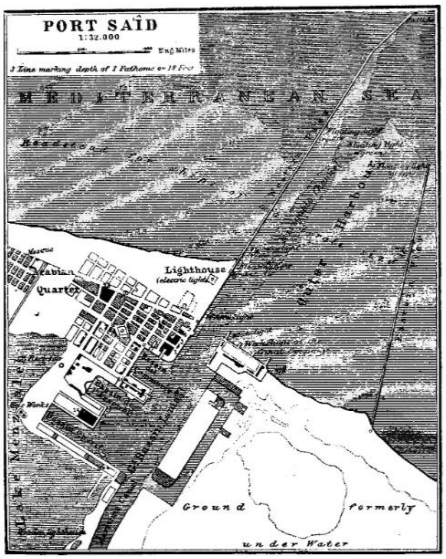
Keterlibatan SCC dalam urusan administrasi kota juga digambarkan dalam artikel Rizq (2026) yang mengulas pemberitaan *Al-Ahram* pada akhir abad ke-19. Artikel tersebut menyebutkan bahwa kantor gubernuran Port Said pada masa awalnya menyewa bangunan milik perusahaan dan menggunakan sejumlah perlengkapan yang dipinjam dari SCC. Keterangan ini memperlihatkan adanya hubungan material antara pemerintahan kota dan perusahaan. Meskipun belum membuktikan bahwa SCC mengendalikan seluruh administrasi lokal informasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan dalam kondisi tertentu bergantung pada fasilitas milik perusahaan (Rizq, 2026).

Jika dibandingkan laporan Hoskins (1882), kajian Carminati (2026), dan perjanjian air tahun 1884 memperlihatkan bentuk pembagian kewenangan yang berbeda. Hoskins menunjukkan pembagian fungsi keamanan dan pemerintahan sipil setelah pendudukan Inggris, sedangkan Carminati menjelaskan perbedaan antara pembiayaan dan pengelolaan pelayanan jalan. Sementara itu, perjanjian air memperlihatkan bahwa hubungan Pemerintah Mesir dan SCC juga berlangsung melalui kesepakatan formal. Ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Port Said tidak tersusun dalam satu

rantai pemerintahan yang sepenuhnya terpusat (Hoskins, 1882; Carminati, 2026; Compagnie universelle du canal maritime de Suez et al., 1884).

Dengan demikian karakteristik tata kelola *multiple* di Port Said pada periode ini ditandai oleh pembagian kewenangan antara Pemerintah Mesir, otoritas militer Inggris, dan SCC. Pemerintah Mesir tetap menjalankan administrasi sipil serta menanggung sejumlah biaya pelayanan, Inggris mengambil peran penting dalam keamanan setelah 1882, sedangkan SCC berpengaruh terhadap pengelolaan kanal dan sejumlah fasilitas perkotaan. Susunan kewenangan tersebut menjadi konteks penting untuk memahami pembentukan ruang kota, termasuk perbedaan kondisi dan pelayanan antara Kuartal Eropa dan Kuartal Arab.

Port Said sejak awal pembentukan terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu *quartier européen* atau Kuartal Eropa dan *quartier arabe* atau Kuartal Arab. Catatan perjalanan dan laporan sezaman menggambarkan Kuartal Arab sebagai kawasan yang terpisah dari permukiman Eropa. Pada 1884, Kuartal Arab digambarkan berada di bagian barat kota, terpisah sekitar 200–500 meter dari kawasan Eropa, berada pada tanah yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap genangan. Bangunannya umumnya lebih rendah dan sempit, serta sebagian menggunakan konstruksi kayu (Friocourt, 1884). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa komposisi sosial penduduk Port Said juga tercermin dalam bentuk ruang tempat mereka tinggal.



Gambar 1. Peta Port Said tahun 1878.

(Sumber: Karl Baedeker, Egypt: Handbook for Travellers, 1878. Diakses pada 6 Oktober 2026, dari https://books.google.com/books?id=BC8MAAAAYAAJ)

Peta tahun 1878 memperkuat gambaran bahwa pembagian ruang telah terbentuk sebelum pendudukan Inggris pada 1882. Dengan demikian, pendudukan Inggris tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya penyebab pemisahan kawasan. Pendudukan tersebut lebih tepat dipahami sebagai fase yang memperkuat dan mengelola struktur ruang yang telah berkembang sebelumnya (Baedeker, 1878).

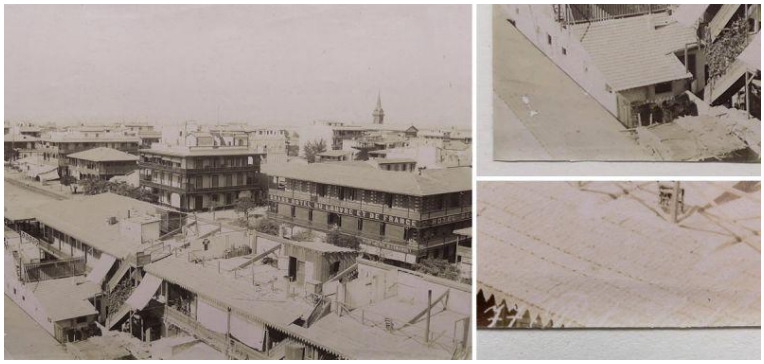
Pemisahan tersebut juga terlihat dalam perkembangan fasilitas kota yang tidak berlangsung bersamaan. Salah satu buktinya adalah pelayanan pos. *Bulletin Hebdomadaire* Administrasi Pos Mesir tanggal 21 Februari 1895 mengumumkan pembukaan kantor pos baru di Kuartal Arab mulai 1 Maret 1895 untuk melayani surat biasa, surat tercatat, dan paket pos. Sebelumnya, penduduk Kuartal Arab harus membawa surat mereka ke kantor pos Mesir yang berada di Kuartal Eropa. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan pos di Kuartal Arab baru tersedia secara tersendiri pada 1895, sementara sebelumnya masih bergantung pada fasilitas pos di kawasan Eropa (Administration des Postes Egyptiennes, 1895).

Keterlambatan pembukaan kantor pos tersebut menunjukkan bahwa fasilitas administratif tidak berkembang secara setara di kedua kawasan. Penduduk Kuartal Arab tetap terhubung dengan sistem administrasi pemerintah tetapi akses mereka terhadap pelayanan pos sebelumnya bergantung pada fasilitas yang berada di Kuartal Eropa. Ketika kondisi geografis Kuartal Arab yang lebih rendah dan rentan genangan ditempatkan bersamaan dengan keterlambatan fasilitas tersebut, tampak adanya ketidakmerataan perkembangan perkotaan antara kedua kawasan (Friocourt, 1884; Administration des Postes Egyptiennes, 1895).

Meskipun demikian kondisi Kuartal Arab tidak sepenuhnya dapat digambarkan sebagai kawasan yang tertinggal atau kumuh. George Warrington Steevens dalam catatannya pada 1898 menyebutkan bahwa Port Said memiliki sekitar 35.000 penduduk dengan sekitar 10.000 orang Eropa. Ia juga menggambarkan rumah-rumah di Kuartal Arab sebagai bangunan yang relatif baru dan sebagian besar cukup bersih serta jalan transportasinya tergolong terawat (Steevens, 1898).

Catatan Steevens memberikan perspektif yang berbeda dari gambaran Friocourt. Jika Friocourt menekankan posisi geografis dan kondisi bangunan Kuartal Arab, Steevens menunjukkan bahwa kawasan tersebut tetap memiliki lingkungan permukiman yang cukup baik. Perbandingan kedua sumber tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan

antara Kuartal Arab dan Kuartal Eropa tidak selalu berarti perbedaan mutlak dalam kualitas lingkungan, melainkan perbedaan pola perkembangan, lokasi, dan waktu penyediaan fasilitas kota (Friocourt, 1884; Steevens, 1898).



Gambar 2: Panorama Kuartal Eropa dari Grand Hotel du Louvre, akhir abad ke-19.

(Sumber: Zangaki Brothers, akhir 1880-an/awal 1890-an. Diakses pada 6 Oktober 2026, dari https://www.raritaeten-shop.com/Collectors-Items/Photography/Albumin-print-panorama-Port-Said-Egypt-Grand-Hotel-du-Louvre-Zangaki-Brothers-late-19th-century%3A%3A3201.html?language=en)

Perbedaan ruang antara kedua kuartal juga berkaitan dengan pekerjaan penduduknya. Masyarakat Arab banyak tinggal di Kuartal Arab dan bekerja sebagai buruh pelabuhan, pengangkut batu bara, serta pekerja lain yang mendukung aktivitas Terusan Suez. Sementara itu, Kuartal Eropa menjadi tempat tinggal dan pusat kegiatan masyarakat asing yang terlibat dalam perdagangan, pelayaran, dan kegiatan ekonomi kota (Reclus, 1884). Dengan demikian, perbedaan tempat tinggal tidak hanya menunjukkan perbedaan asal-usul penduduk, tetapi juga perbedaan posisi mereka dalam struktur ekonomi pelabuhan.



Gambar 3: Jalan dan permukiman di kawasan Arab Port Said 1870–1890.

(Sumber: Peridis, Village Arabe à Port Saïd, sekitar 1870–1890, Rijksmuseum, koleksi RP-F-F00999-CS. Diakses pada 6 Oktober 2026, dari

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/object/Straat-in-het-Arabisch-deel-van-Port-Said--127c9bdc2de14e0ebd3bcc8079ac25e7)

Ketidaksetaraan yang terlihat di Port Said pada akhir abad ke-19 lebih tepat dipahami sebagai ketidaksetaraan spasial dan sosial, bukan sebagai bukti langsung adanya diskriminasi agama. Sumber yang ditemukan tidak menunjukkan bahwa Muslim di Kuartal Arab dilarang beribadah atau secara khusus dibatasi karena agama Islam. Sebaliknya keberadaan masjid di Kuartal Arab tetap tercatat dalam peta Port Said tahun 1884 (Egypt Study Circle, 2020).

Pola tersebut penting untuk memahami perkembangan masyarakat Muslim di Kuartal Arab. Pemusatan penduduk Arab dalam kawasan tertentu tidak hanya membentuk lingkungan tempat tinggal tetapi juga menjadi ruang sosial bagi perkembangan kehidupan masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, setelah melihat bagaimana pembagian ruang dan ketidakmerataan perkembangan kota terbentuk, pembahasan selanjutnya diarahkan pada pertumbuhan komunitas Muslim yang menempati Kuartal Arab pada periode 1882–1904.

Pertumbuhan Komunitas Muslim di Kuartal Arab

Pertumbuhan komunitas Muslim di Port Said berkaitan erat dengan kedatangan penduduk Mesir sejak awal pembangunan Terusan Suez pada 1859. Sumber *Le Tour du monde* tahun 1863 memuat gambaran *Village arabe près de Port-Saïd*, yaitu permukiman penduduk Arab di dekat Port Said. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan permukiman penduduk Mesir telah terbentuk ketika pembangunan kanal masih berlangsung (Grenet de Joigny, 1863). Pada akhir 1859 Port Said baru dihuni sekitar 300 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 2.000 orang pada 1860. Pertumbuhan penduduk Mesir sejak masa awal tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terbentuknya lingkungan permukiman Arab di sekitar kota (Manning, 1877).

Pada akhir 1869 pembangunan Terusan Suez telah selesai dan jumlah penduduk Port Said diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang (Fontane & Riou, 1869). Kehadiran penduduk Mesir tidak berhenti setelah pekerjaan pembangunan kanal selesai. Sebagian pekerja tetap tinggal di Port Said dan melanjutkan kehidupan mereka di kota yang berkembang sebagai pelabuhan. Dengan demikian, kedatangan awal penduduk Mesir tidak hanya berkaitan dengan tenaga kerja pembangunan, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan permukiman yang lebih menetap.

Keberadaan lingkungan penduduk Arab semakin jelas pada dekade 1880-an. Catatan perjalanan Booty pada 1884 menggambarkan adanya *Arab town* sebagai bagian dari lingkungan kota ketika ia mengunjungi Port Said. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa kawasan permukiman Arab telah dikenal sebagai bagian dari kehidupan kota pada periode tersebut (Booty, 1885).



Gambar 4: Kawasan Arab Town di Port Said, 1900.
(Sumber: Technisches Museum Wien, koleksi digital, diakses pada 6 Oktober 2026, dari https://forschung.tmw.at/archive/content/titleinfo/81540)

Catatan John Augustus Milbourne Marsh pada 1891 menyebut keberadaan buruh Mesir yang datang ke kapal-kapal di pelabuhan serta penduduk Mesir yang ditemuinya ketika berjalan di kota. Catatan tersebut tidak memberikan jumlah khusus komunitas Muslim tetapi menunjukkan bahwa penduduk Mesir telah menjadi bagian yang menetap dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari Port Said pada dekade terakhir abad ke-19 (Marsh, 1891). Pertumbuhan komunitas Muslim juga terlihat dari keberadaan kehidupan keagamaan di lingkungan penduduk Mesir sejak periode awal. Catatan perjalanan seorang Muslim dari Zanzibar, Ḥumayd ibn Aḥmad ibn Sayf al-Bū-Saʿīdī, yang singgah di Port Said selama empat belas hari pada 1872 mencatat bahwa penduduk Muslim Port Said telah memiliki sebuah masjid. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunitas Muslim telah memiliki ruang ibadah bersama ketika Port Said masih berada pada tahap awal perkembangannya. Namun sumber tersebut tidak menyebut mazhab atau aliran tertentu yang dianut penduduk Muslim Port Said sehingga tidak cukup untuk menyebut komunitas tersebut sebagai Sunni atau menghubungkannya dengan mazhab tertentu (Landau, 1980).

Kehidupan komunitas Muslim Port Said juga terhubung dengan praktik keagamaan masyarakat Muslim Mesir yang lebih luas. Pada 1873 keterlambatan informasi mengenai penampakan bulan Ramadan dari Kairo menyebabkan umat Islam di Port Said tidak memulai puasa pada hari yang sama dengan yang seharusnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Port Said mengikuti penentuan awal Ramadan yang berkaitan dengan jaringan informasi keagamaan dari Kairo. Dengan demikian, komunitas Muslim Port Said tidak berkembang sebagai kelompok yang terpisah dari kehidupan keagamaan Mesir, melainkan tetap terhubung dengan praktik keagamaan di wilayah lain (Barak, 2013).

Berdasarkan data yang dicatat Arthur Silva White jumlah penduduk Port Said meningkat dari 16.560 jiwa pada 1882 menjadi 42.095 jiwa pada 1897. Peningkatan tersebut mencapai 25.535 jiwa atau sekitar 154,2% dalam kurun lima belas tahun (White, 1899). Angka ini mencakup seluruh penduduk Port Said sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk menentukan jumlah maupun tingkat pertumbuhan penduduk Muslim secara khusus. Data sensus juga menunjukkan bahwa Islam merupakan agama mayoritas penduduk Mesir pada 1897. Dari sekitar 9,73 juta penduduk Mesir sekitar 8,98 juta tercatat sebagai Muslim. Namun, angka tersebut merupakan angka untuk seluruh Mesir dan bukan angka khusus Port Said. Karena itu data tersebut hanya dapat digunakan untuk memberikan konteks umum mengenai posisi komunitas Muslim dalam masyarakat Mesir bukan untuk menentukan jumlah Muslim di Kuartal Arab (Gouvernement Égyptien, 1898). Peningkatan jumlah penduduk Port Said berdampak pada kebutuhan sosial dan keagamaan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang menetap di kota, semakin besar pula kebutuhan akan tempat ibadah, ruang pertemuan, jaringan solidaritas, dan layanan keagamaan. Kondisi tersebut menjadi latar penting bagi perkembangan institusi keagamaan Muslim di Kuartal Arab.

Memasuki awal abad ke-20, perkembangan Kuartal Arab semakin terlihat dari jumlah penduduknya. *A Handbook for Travellers in Egypt* mencatat bahwa pada 1903 Kuartal Arab dihuni oleh lebih dari 7.600 orang. Sumber tersebut menyebut jumlah penduduk kawasan dan sebuah masjid, tetapi angka 7.600 tidak dapat disamakan secara langsung dengan jumlah Muslim karena sumber tidak memberikan rincian agama penduduknya. Meskipun demikian, jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kuartal Arab telah berkembang menjadi lingkungan permukiman yang dihuni ribuan orang pada akhir periode penelitian (Murray, 1903).

Dengan ini pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab berlangsung secara bertahap sejak pembangunan Terusan Suez. Pada tahap ini pertumbuhan komunitas tidak lagi hanya berkaitan dengan jumlah penduduk tetapi juga dengan semakin besarnya kebutuhan untuk menunjang kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai perkembangan institusi keagamaan Muslim di Kuartal Arab selama 1882–1904.

Perkembangan Institusi Keagamaan Muslim Pada 1882–1904

Perkembangan institusi keagamaan Muslim di Kuartal Arab Port Said pada 1882–1904 tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan penduduk dan pembentukan ruang permukiman di kota pelabuhan tersebut. Sejak pembangunan Terusan Suez dimulai pada 1859 Port Said berkembang menjadi tempat tinggal pekerja, pedagang, dan penduduk dari berbagai latar belakang. Dalam proses pembangunan yang terjadi Kuartal Arab menjadi salah satu kawasan utama tempat masyarakat Mesir bermukim. Carminati (2023) menjelaskan bahwa pada masa awal perkembangan kota Perusahaan Terusan Suez menyediakan lahan bagi sejumlah komunitas keagamaan untuk mendirikan tempat ibadah. Di kawasan permukiman Arab masyarakat Muslim telah menggunakan masjid kayu yang kemudian mengalami kerusakan dan tidak lagi mencukupi kebutuhan jamaah. Dengan demikian perkembangan institusi Muslim berawal dari kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah di tengah pertumbuhan kota yang dibentuk oleh kegiatan perusahaan dan administrasi kolonial.

Perubahan penting terjadi pada 1882 melalui pembangunan Masjid Tawfiqi. Menurut Masrawy (2018) pembangunan masjid tersebut berkaitan dengan kunjungan Khedive Tawfiq ke Port Said pada 1881. Setelah melihat kondisi tempat ibadah masyarakat Khedive Tawfiq memerintahkan Diwan al-Awqaf untuk membangun masjid baru. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada 7 Desember 1882 sedangkan masjid tersebut mulai digunakan secara resmi pada Mei 1885 (Khidr , 2018). Perbedaan antara tahun peletakan batu pertama dan pembukaan masjid menunjukkan bahwa perkembangan institusi keagamaan berlangsung melalui beberapa tahap, bukan hanya melalui keputusan pendirian.



Gambar 5: Masjid Tawfiqi

(Sumber: RIBA Collections, Tawfiq Mosque, Port Said, fotografer E. Lauro, tanggal gambar menurut katalog 1880. diakses pada 6 Oktober 2026, https://www.ribapix.com/tawfiq-mosque-port-said_riba5783)

Pembangunan Masjid Tawfiqi juga memperlihatkan keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat dalam kehidupan keagamaan setempat. El-Balad (2022) menyebut Syekh Abd al-Rahman Abi al-Hasan sebagai salah satu tokoh penting yang memimpin kegiatan keagamaan di Port Said. Setelah imam sebelumnya meninggal pada 1878 qadi dan tokoh masyarakat setempat memilih Syekh Abd al-Rahman untuk memimpin salat dan membimbing masyarakat. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap institusi keagamaan tidak hanya menyangkut bangunan tetapi juga keberadaan imam dan kepemimpinan agama yang menjaga keberlangsungan ibadah masyarakat. Informasi tersebut memberikan gambaran tentang hubungan antara tokoh agama, masyarakat, dan otoritas pengelola wakaf dalam perkembangan Masjid Tawfiqi.

Selain pembangunan masjid terdapat rencana mendirikan sekolah bagi anak-anak di dekat Masjid Tawfiqi. Rencana ini disebut dalam pemberitaan mengenai sejarah masjid (Masrawy, 2018). Menjelang akhir abad ke-19 pertumbuhan penduduk kembali meningkatkan kebutuhan terhadap tempat ibadah. Pemberitaan *Al-Muqattam* tanggal 21 Desember 1898 sebagaimana dikutip oleh Khidr, (2018) menyebut keputusan Diwan al-Awqaf untuk membangun masjid tambahan di Port Said. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keadaan masyarakat Muslim yang jumlahnya dilaporkan mendekati 30.000 orang. Menurut laporan yang dikutip itu, banyak jamaah terpaksa melaksanakan salat Jumat di jalan karena masjid yang tersedia tidak mampu menampung mereka. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung lebih cepat daripada penyediaan fasilitas ibadah yang memadai.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk memahami persoalan ruang di Kuartal Arab. Meskipun masyarakat Muslim telah memiliki Masjid Tawfiqi, kapasitas tempat ibadah itu tidak mencukupi kebutuhan jamaah. Keadaan ini menunjukkan ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan fasilitas yang tersedia. Carminati (2026) juga menjelaskan bahwa perkembangan Port Said melibatkan tantangan pengelolaan kota, termasuk kebersihan dan penyediaan fasilitas publik di tengah pertumbuhan penduduk.

Rencana pembangunan Masjid Abbasiyah menjadi upaya berikutnya untuk menjawab keterbatasan tersebut. Catatan sejarah yang dimuat Khidr (2018) menyebut bahwa Diwan al-Awqaf merencanakan pembangunan masjid tambahan kemudian Khedive Abbas Hilmi II memerintahkan penyediaan lahan seluas 4.000 meter persegi. Namun sumber-sumber yang tersedia berbeda dalam menentukan kronologi awal pembangunan sebagian menyebut keputusan pembangunan pada 1889 sedangkan catatan lain menghubungkannya dengan keputusan tahun 1898 dan 1904 (Khidr 2018). Perbedaan ini tidak boleh dihilangkan dengan memilih satu tahun tanpa pemeriksaan terhadap sumber sezaman. Untuk periode penelitian, bukti yang paling relevan ialah adanya kebutuhan terhadap masjid tambahan dan proses administratif yang mendahului pembukaan Masjid Abbasiyah pada 1905.



Gambar 6: Masjid Abbas, Port-Said, Mesir

(Sumber: Oriental Commercial Bureau, The Abbas Mosque, kartu pos dalam koleksi Eliot Elisofon Photographic Archives, National Museum of African Art, Smithsonian Institution. diakses pada 6 Oktober 2026, https://www.si.edu/es/object/archives/components/sova-eepa-2001-001-ref3800)

Masalah pembangunan Masjid Abbasiyah memperlihatkan bahwa keputusan pemerintah tidak selalu langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Khidr, (2018), dengan mengutip pemberitaan *Al-Zahir* tanggal 31 Maret 1904 menyebut kritik terhadap

penggunaan lahan dan rancangan bangunan masjid. Laporan tersebut menjelaskan bahwa bangunan dirancang hanya menempati sebagian kecil lahan yang disediakan sedangkan sebagian ruang lainnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan salat.

Perkembangan Masjid Tawfiqi dan Masjid Abbasiyah memperlihatkan peran sejumlah otoritas dalam penyediaan institusi keagamaan. Khedive Tawfiq dan Khedive Abbas Hilmi II memberikan dukungan melalui keputusan pembangunan. Sedangkan Diwan al-Awqaf menjalankan peran administratif dalam penyediaan fasilitas ibadah. Pada tingkat masyarakat, ulama, qadi, imam, dan tokoh setempat berperan dalam kepemimpinan serta keberlangsungan kegiatan keagamaan (Masrawy, 2018). Perkembangan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan pemerintah dari atas, sebab kebutuhan masyarakat dan keterlibatan tokoh agama juga menjadi bagian penting dari prosesnya.

Kajian arsitektur Seddi dan Fouad (2021) serta catatan sejarah yang diterbitkan State Information Service (2017) membantu mengidentifikasi Masjid Tawfiqi dan Masjid Abbasiyah sebagai bagian dari warisan bangunan keagamaan Port Said. Sementara itu pemberitaan Al-Masry Al-Youm (2018) dan Youm7 (2023) memberikan informasi tambahan mengenai sejarah serta pemugaran Masjid Abbasiyah. Sumber-sumber tersebut berguna untuk memahami keberlanjutan keberadaan bangunan tetapi tidak semuanya menyediakan bukti langsung tentang kondisi masyarakat pada 1882–1904.

Secara keseluruhan perkembangan institusi keagamaan Muslim di Kuartal Arab Port Said selama 1882–1904 terutama dapat dibuktikan melalui pembangunan Masjid Tawfiqi, keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat, serta upaya mendirikan Masjid Abbasiyah untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah keterbatasan ruang ibadah dan persoalan pelaksanaan pembangunan. Kondisi jamaah yang harus melaksanakan salat Jumat di jalan menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas keagamaan belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat sedangkan kritik terhadap pembangunan Masjid Abbasiyah memperlihatkan masalah dalam pemanfaatan lahan. Dengan demikian, masyarakat Muslim tetap mengupayakan pengembangan institusi keagamaan meskipun menghadapi keterbatasan ruang dan administrasi.

KESIMPULAN

Perkembangan Port Said pada 1882–1904 berlangsung dalam tata kelola yang melibatkan Pemerintah Mesir, otoritas militer Inggris, dan Suez Canal Company (SCC).

Ketiganya memiliki peran dan kepentingan berbeda dalam pengelolaan kota, mulai dari administrasi sipil dan keamanan hingga pelayanan publik serta fasilitas pelabuhan. Pembagian kewenangan tersebut berlangsung bersamaan dengan pemisahan ruang antara Kuartal Eropa dan Kuartal Arab yang telah terbentuk sebelum pendudukan Inggris pada 1882. Perbedaan kondisi geografis dan keterlambatan penyediaan fasilitas tertentu, seperti kantor pos di Kuartal Arab yang baru dibuka pada 1895, memperlihatkan ketidakmerataan perkembangan perkotaan.

Pertumbuhan komunitas Muslim di Kuartal Arab berkaitan dengan perkembangan Port Said sejak pembangunan Terusan Suez pada 1859. Kedatangan penduduk Mesir termasuk pekerja yang kemudian menetap turut membentuk permukiman Arab yang semakin dikenal pada akhir abad ke-19. Catatan perjalanan dan laporan sezaman menunjukkan keberadaan penduduk Mesir dalam kehidupan sehari-hari kota serta adanya masjid dan praktik keagamaan yang menghubungkan masyarakat Port Said dengan kehidupan Islam di Mesir. Meskipun jumlah penduduk Port Said dan Kuartal Arab meningkat data yang tersedia tidak memberikan angka pasti mengenai jumlah Muslim secara khusus. Dengan demikian pertumbuhan komunitas Muslim dapat dipahami melalui perkembangan permukiman, keberadaan kehidupan keagamaan, dan meningkatnya kebutuhan sosial masyarakat, bukan melalui penyamaan jumlah seluruh penduduk dengan jumlah umat Islam.

Perkembangan institusi keagamaan Muslim di Kuartal Arab pada 1882–1904 terutama terlihat melalui pembangunan Masjid Tawfiqi, peran ulama dan tokoh masyarakat dalam memimpin kehidupan keagamaan, serta upaya administratif untuk membangun masjid tambahan yang kemudian dikenal sebagai Masjid Abbasiyah. Keterlibatan Khedive Tawfiq dan Khedive Abbas Hilmi II menunjukkan dukungan penguasa, sedangkan Diwan al-Awqaf berperan dalam proses penyediaan fasilitas ibadah. Pada saat yang sama, ulama, qadi, imam, dan tokoh masyarakat turut menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Namun, pembangunan institusi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jamaah. Laporan mengenai salat Jumat yang meluber hingga ke jalan menunjukkan keterbatasan kapasitas tempat ibadah sementara kritik terhadap rancangan pembangunan Masjid Abbasiyah memperlihatkan persoalan dalam pemanfaatan lahan. Oleh karena itu perkembangan institusi keagamaan Muslim di Port Said tidak hanya menunjukkan adanya dukungan penguasa dan inisiatif masyarakat tetapi juga memperlihatkan kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan keagamaan dan

penyediaan fasilitas yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan institusi Muslim berlangsung melalui keterlibatan berbagai pihak, di tengah keterbatasan ruang dan persoalan administratif yang belum sepenuhnya terselesaikan selama periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Administration des Postes Egyptiennes. (1895). Bulletin hebdomadaire, no. 8, 21 Februari 1895. https://www.egyptstudycircle.org.uk/QCs/QC269.pdf

Compagnie universelle du canal maritime de Suez. (1884). Dokumen perjanjian penyediaan air tawar, 13 Desember 1884. Archives nationales du monde du travail. https://recherche-anmt.culture.gouv.fr/

Gouvernement Égyptien. (1898). Recensement général de l'Égypte. Le Caire: Imprimerie nationale.https://pmb.culture.fr/opac_anmt/index.php?lvl=notice_display&id=23015

Buku

Abdurrahman, Dudung. (2011). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak. https://perpustakaan.idaqu.ac.id/opac/detail-opac?id=296

Baedeker, Karl. (1878). Egypt: Handbook for Travellers. Leipzig: Karl Baedeker. https://books.google.com/books?id=BC8MAAAAYAAJ

Baedeker, Karl. (1885). Egypt: Handbook for Travellers. Leipzig: Karl Baedeker. https://archive.org/search?query=title%3A%22Egypt%3A+Handbook+for+Travellers%22+AND+year%3A1885

Booty, Ada. (1885). Diary of a Voyage, 1884–1885. State Library of New South Wales. https://archival-classic.sl.nsw.gov.au/_transcript/2017/D00007/a1743.html

Fontane, Marius, dan Édouard Riou. (1869). Le canal maritime de Suez illustré. Paris: Hachette. https://books.google.ae/books?id=dYdHAAAAYAAJ

Grenet de Joigny. (1863). "Village arabe près de Port-Saïd." Le Tour du monde. Paris: Hachette. https://gallica.bnf.fr/

Manning, Samuel. (1875). The Land of the Pharaohs: Egypt and Sinai, Illustrated by Pen and Pencil. London: Religious Tract Society. https://ediscovery.qnl.qa/islandora/object/QNL%3A00053556

Murray, John. (1903). A Handbook for Travellers in Egypt. London: John Murray. https://archive.org/search?query=title%3A%22A+Handbook+for+Travellers+in+Egypt%22+AND+year%3A1903

Reclus, Élisée. (1884). The Earth and Its Inhabitants: Africa. https://en.wikisource.org/wiki/Africa_by_%C3%89lis%C3%A9e_Reclus/Volume_1/Chapter_12

Steevens, George Warrington. (1898). Egypt in 1898. London: William Blackwood and Sons. https://books.google.com/books?id=LqI2AAAAMAAJ

White, Arthur Silva. (1899). The Expansion of Egypt Under Anglo-Egyptian Condominium. London: Methuen & Co. https://archive.org/details/expansionofegyp00whit

Artikel Jurnal

Barak, On. (2013). "Outdating: The Time of 'Culture' in Colonial Egypt." Grey Room, 53, 6–31. https://www.greyroom.org/issues/53/9/outdating-the-time-of-culture-in-colonial-egypt/

Carminati, Lucia. (2020). “Dividing and Ruling a Mediterranean Port-City: The Many Boundaries Within Late Nineteenth-Century Port Said.” Dalam Marco Folin dan Heleni Porfyriou (Ed.), Controversial Heritage and Divided Memories from the Nineteenth Through the Twentieth Centuries: Multi-Ethnic Cities in the Mediterranean World, 30–44. London: Routledge. https://www.routledge.com/Controversial-Heritage-and-Divided-Memories-from-the-Nineteenth-Through/Folin-Porfyriou/p/book/9780367545598

Carminati, Lucia. (2022). “An Unhappy Happy Port: Fin-de-Siècle Port Said and Its Connections and Disconnections of Water and Iron.” International Journal of Middle East Studies, 54, 731–739.

Carminati, Lucia. (2026). “Faecal Matters: An Excremental Archive of Early Port Said.” Urban History, 53(2), 195–211. https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history/article/faecal-matters-an-excremental-archive-of-early-port-said/4FAFACFC8DCE120D69715DCF93012822

El-Amrousi, Mohamed Mohamed. (2001). Beyond Muslim Space: Jeddah, Muscat, Aden and Port Said. Disertasi doktoral, University of California, Los Angeles.

Friocourt. (1884). Contributions à la géographie médicale. II. Station du Levant. Archives de médecine navale, 42.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Archives_de_m%C3%A9decine_navale._Volume_42%2C_1884._%28IA_s423id13662660%29.pdf

Hoskins, A. H. (1882). “The Seizure of the Suez Canal.” Proceedings of the United States Naval Institute, 8(4).https://www.usni.org/magazines/proceedings/1882/october/seizure-suez-canal

Marsh, John Augustus Milbourne. (1884–1885). Diary of John Augustus Milbourne Marsh. https://www.jjhc.info/marshjohnaugustusmilbourne1891diary1885

Massey, Douglas S., dan Nancy A. Denton. (1988). “The Dimensions of Residential Segregation.” Social Forces, 67(2), 281–315. https://doi.org/10.1093/sf/67.2.281

Seddik, Raghda Yehia, dan Randa Alaa El-Din Fouad. (2021). “A Neglected Built Heritage: The Museum of the Suez Canal Authority in Port Said.” Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 21(5), 48–78. https://doi.org/10.21608/jaauth.2021.106687.1267

Majalah

Rizq, Yunan Labib. (2026, 10 Oktober). “Two Cities in One: The Untold Story of Port Said’s Colonial Divide.” Ahram Online. https://english.ahram.org.eg/NewsContent/67/1288/578594/AlAhram-Weekly-archives/Chronicles-/Two-Cities-in-One-The-Untold-Story-of-Port-Said%E2%80%99s-.aspx

Koran

Al-Masry Al-Youm. (2018, 21 April). “ اكتشاف نقش من «بردة البوصيري» خلال ترميم المسجد العباسي ببورسعيد”. https://www.almasryalyoum.com/news/details/1283429

Berita Populer

Al-Ghazawi, Muhammad. (2022, 19 April). “ المسجد التوفيقي.. قصة إنشاء أول مساجد بورسعيد فى عهد الدولة العثمانية| شاهد”. Sada El-Balad. https://www.elbalad.news/5245308

Khidr, Khudair. (2018, 3 Agustus). Artikel mengenai Masjid Abbasiyah di Port Said. بوابة الأهرام (Ahram Gate). https://gate.ahram.org.eg/News/1997778.aspx

Masrawy. (2018, 21 Mei). “التوفيقي والعباسي.. أقدم مسجدين في بورسعيد بنفحات رمضانية (صور)”. https://www.masrawy.com/

Masrawy. (2018, 3 Agustus). Artikel mengenai renovasi Masjid Abbasiyah di Port Said. https://www.masrawy.com/

State Information Service. (t.t.). “المسجد العباسي”. https://www.sis.gov.eg/

Youm7. (2023, 12 Mei). “دُرة مساجد بورسعيد.. العباسى يحكى تاريخ نضال أهالى المدينة الباسلة”. https://www.youm7.com/

Foto

Grech, P. L. (2019). Hai-El-Arab, Port Said. Quarterly Circular, 23(10), 226–239. https://www.egyptstudycircle.org.uk/QCs/QC269.pdf

Lauro, E. (1880). *Tawfiq mosque, Port Said* [Photograph]. RIBA Collections. https://www.ribapix.com/tawfiq-mosque-port-said_riba5783

Oriental Commercial Bureau. (t.t.). *The Abbas Mosque, Port-Said, Egypt* [Kartu pos]. Eliot Elisofon Photographic Archives, National Museum of African Art, Smithsonian Institution. https://www.si.edu/es/object/archives/components/sova-eepa-2001-001-ref3800

Peridis. (sekitar 1870–1890). *Village Arabe à Port Saïd* [Fotografi]. Rijksmuseum, RP-F-F00999-CS. https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/object/Straat-in-het-Arabisch-deel-van-Port-Said--127c9bdc2de14e0ebd3bcc8079ac25e7

Technisches Museum Wien. (sekitar 1900). *Port-Said. Arab Town* [Kartu pos]. Objek BPA-018612. https://forschung.tmw.at/archive/content/titleinfo/81540

Zangaki Brothers. (akhir abad ke-19). *Panorama of Port Said, Egypt, Grand Hotel du Louvre* [Fotografi albumen]. Raritäten-Shop. https://www.raritaeten-shop.com/Collectors-Items/Photography/Albumin-print-panorama-Port-Said-Egypt-Grand-Hotel-du-Louvre-Zangaki-Brothers-late-19th-century%3A%3A3201.html